

MENAPAK ARAH KE DEPAN
MASYARAKAT PENANGGULANGAN BENCANA INDONESIA (MPBI)
Suatu Perspektif Awal Tahun 2009
Januari 2009

PERSPEKTIF AWAL TAHUN 2009 MPBI

[1] Risalah ini adalah suatu tekad MPBI dalam rangka memasuki tahun baru 2009, yang menggariskan suatu bacaan situasi penanggulangan bencana (PB) di Indonesia, suatu kajian dan refleksi MPBI, arah dan tekad organisasi pada tahun-tahun yang akan datang, dan akhirnya, suatu permintaan terbuka kepada para pemangku kepentingan untuk mendorong MPBI mewujudkan tekad tersebut. MPBI mengundang para anggota, pengurus, mitra dan sejawat untuk memanfaatkan risalah ini sebagai salah satu sarana dan acuan untuk bertukar pikiran demi memajukan PB di Indonesia - dan membawa keunggulannya ke tataran kawasan Asia/Asia Tenggara dan dunia.

BENTANGAN CAKRAWALA PB DI INDONESIA

[2] Indonesia telah dinyatakan sebagai salah satu negara paling rawan bencana. Menurut *International Strategy for Disaster Reduction (ISDR) 2006-2009 Tahun 2005*, Indonesia menduduki urutan ke-7 di antara negara-negara yang rawan bencana. Kenyataan terus menunjukkan bagaimana Indonesia tetap rentan terhadap bencana - baik yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan lainnya maupun non alam seperti banjir, penyakit menular, kebakaran hutan dan lainnya. Kerentanan tersebut dipengaruhi oleh dinamika sosial politik seperti jumlah penduduk, faktor ekonomi, kemiskinan, lingkungan yang makin rusak, perubahan iklim yang mengakibatkan makin lama kerentanan itu makin meningkat. Keadaan diperparah dengan banyak terjadinya bencana bencana yang bersifat lokal, berskala kecil dan sedang, sehingga tidak selalu mendapat perhatian secara nasional apalagi internasional. Maka penanganan, dampak, dan pemulihannya menjadi beban masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Kebanyakan di antara mereka, tanpa dukungan dan bantuan yang memadai, cenderung akan menjadi lebih rentan dalam menghadapi bencana-bencana yang dapat terjadi dikemudian hari.

Konteks risiko bencana di Indonesia semakin meningkat. Keadaan Indonesia yang rawan terhadap dampak bencana sudah dikenal secara luas, termasuk diantaranya: gempabumi berpotensi tsunami disepanjang 5000 Km garis pantai, ratusan gunungapi, titik-titik longsor, dan banjir-banjir pesisir. Kerugian akibat bencana di Indonesia telah mencapai sekitar 14 M Dolar Amerika, menimpa sebanyak dua juta orang dan menewaskan sekitar 175.000 orang. Angka-angka statistik ini hanya menyebutkan sepuluh besar bencana di Indonesia sejak tahun 2004. Kebanyakan dari kerugian ini secara disproporsional menimpa kehidupan kelompok-kelompok yang rentan seperti anak-anak dan para remaja, perempuan, dan kaum lanjut usia

[3] Pada tanggal 3 Maret 2003 Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) lahir dengan tujuan mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia dan menjadi mitra kritis bagi berbagai pihak demi tercapainya PB yang dilaksanakan secara profesional dan yang selaras antara ilmu dan praktik. Dalam mencapai tujuan tersebut, MPBI mengembangkan lima program utama yaitu:

1. Mengembangkan PB melalui pendidikan, penelitian dan penerapan.
2. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar anggota.
3. Menjalin komunikasi dan kerjasama dengan lembaga, instansi dan/atau organisasi profesi lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
4. Merumuskan dan mengawasi pelaksanaan kode etik PB oleh para anggotanya.
5. Melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat tentang kaidah-kaidah PB.
6. Membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan PB. (Anggaran Dasar MPBI)

[4] Dari enam program itu, MPBI berproses dalam melakukan konseptualisasi nilai-nilai, advokasi dan negosiasi bersama-sama para rekan sejawat masyarakat adab sampai dengan formalisasi Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UUPB). Dengan lahirnya UUPB maka lahirlah berbagai kebijakan turunan serta pengarusutamaan perencanaan dan pendanaan PB. Ini adalah suatu pencapaian berarti bagi suatu bangsa dalam kancah PB di dunia. MPBI sudah mulai melihat perubahan-perubahan positif seperti diamanatkan oleh semangat UUPB ini. Tetapi harus juga diakui ada banyak kekurangan, tidak hanya terbatas pada konteks birokrasi, maupun juga pada kalangan masyarakat adab dan universitas. Amanah UUPB yang kita dorong untuk menjadi sandaran tujuan mulia, yaitu memperjuangkan hak rakyat atas rasa aman dan terlindungi dari bencana, belum sepenuhnya dilaksanakan. Panjangnya birokrasi dan rumitnya proses penyelarasan antar berbagai peraturan sering bertabrakan dengan norma-norma otonomi daerah dan terus mengalami banyak ketimpangan dan memerlukan proses yang masih jauh dari sempurna.

[5] Lahirnya Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) sebagai motor dari UUPB dalam konteks transformasi birokrasi PB di Indonesia belum menampakkan hasil yang memuaskan, karena masih berada dalam kondisi transisi dan belum memiliki sumber daya manusia yang memadai. Perkembangan pada tataran daerah - di mana sebagian besar bencana benar-benar terjadi, beragam dan pada beberapa tempat justru lebih tidak menentu lagi. Beberapa upaya publik yang diselenggarakan secara serampangan yang acapkali justru melemahkan makna UUPB. Di sisi yang lain, ada kekurangan jumlah dan mutu "watchdog" yang secara konsisten dan mandiri memantau proses-proses perubahan itu. Akibatnya proses transformasi itu belum menjadi proses yang utuh, runtut, terencana, dan terkendali.

[6] Masyarakat adab sebagai salah satu komponen bangsa Indonesia dalam kancah PB merupakan kekuatan yang luar biasa. Muncul kekuatan-kekuatan di tingkat nasional. Dompok Dhuafa, Yakkum Emergency Unit (YEU), Yayasan Tanggul Bencana (YTBI), Walhi, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Perwalian umat Buddha di Indonesia (WALUBI), PMI dan lain sebagainya yang juga berlomba-lomba untuk membawa skema-skema PB dan menawarkannya kepada publik. Di daerah dan sektor semakin banyak lagi pemain yang terlibat dalam PB. Tetapi potensi-potensi ini masih bersifat latent karena belum ada suatu arena untuk membawa wacana secara memadai baik di antara mereka sendiri maupun untuk dan atas nama publik. Padahal pada dekade depan ini, dengan semakin dewasanya demokrasi

di Indonesia, dapat dipastikan bahwa peran masyarakat adat akan menjadi semakin penting untuk mengimbangi politik negara dan birokrasi pemerintah.

Peran masyarakat adat dalam kegiatan pengurangan risiko inilah yang ingin diwadahi dan dilembagakan dalam suatu forum yang dinamai Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana (Platform PRB) sebagai suatu forum formal multisektoral melalui proses partisipatoris untuk menggalang koordinasi, analisis, dan saran tentang penyelenggaraan PB yang lebih baik dan pengarusutamaannya kedalam pembangunan. MPBI sebagai salah satu unsur masyarakat adat ikut aktif menggagas bagaimana dan seperti apa platform nasional yang dicita-citakan itu.

[7] Anasir profesionalisme praktik PB berhasil dimasukkan ke dalam UUPB tetapi sampai pada titik ini praktik yang profesional (berkesadaran, teratur, dan berdasar suatu standar publik) masih belum menjadi wacana publik. Saat ini siapapun, lembaga atau organisasi macam apapun, dengan cara apapun masih menyelenggarakan pelayanan dan pekerjaan PB secara naluriah. Belum ada pendidikan publik yang memadai untuk memberikan suatu momentum pendidikan dan pembangunan kapasitas PB dan walaupun ada bersifat juga lepas-lepas. Belum ada proses akreditasi, sertifikasi dan lisensi praktik PB ini.

[8] Singkatnya, telah terjadi perubahan-perubahan signifikan pada cakrawala PB di Indonesia dibandingkan dengan tahun-tahun pada awal dekade 2000-an, tetapi perubahan-perubahan itu masih jauh dari harapan dan berlangsung tanpa melalui proses-proses yang memadai. Sementara tantangan-tantangan baru terus terbuka dan menuntut respon dari berbagai komponen PB di Indonesia.

CAPAIAN MPBI

[9] MPBI selama lima tahun eksistensinya telah mencapai suatu kemajuan yang luar biasa. Peran dan kiprahnya dalam banyak hal telah memberikan sumbangsih kepada lapangan PB di Indonesia. Diakui oleh banyak pihak bahwa MPBI adalah salah satu pendorong yang menggalang masyarakat adat ke arah formalisasi UUPB dan sekarang terus bergerak di bidang-bidang penyusunan peraturan-peraturan turunan dari Undang-Undang itu (Perpres, PP, Permen, Perda, dan pedoman-pedoman teknis PB). Sejumlah daerah kemudian beradu cepat untuk menyusun Perda tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti dengan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai mandat UUPB tersebut. MPBI setidaknya berperan dalam mendorong beberapa pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan PB yang berupa Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) yang telah disahkan dan terdapat di beberapa daerah antara lain Kota Padang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Jawa Tengah, dan beberapa daerah lain tengah mengalami proses penyusunan dan diskusi mengenai RAD-PRB ini, daerah tersebut diantaranya adalah Propinsi NAD, Propinsi Sulawesi Tengah, Kota Yogyakarta, Kabupaten Nias dan Nias Selatan, Kabupaten Ende dan beberapa provinsi atau kota/kabupaten lainnya.

[10] Pada tahun-tahun awalnya MPBI juga menjadi aktor advokasi utama yang konsisten di bidang PB dan bahkan "memasang badan" untuk peristiwa dunia seperti hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional (HPRB). MPBI secara konsisten sejak tahun 2004 memperingati

HPRB yang jatuh pada tiap hari Rabu minggu kedua bulan Oktober melalui serangkaian kegiatan; seminar, workshop, pameran, konferensi pers, dan sebagainya. Rangkaian kegiatan peringatan HPRB dimaksudkan selain untuk mensosialisasikan gagasan tentang pentingnya pengurangan risiko bencana juga mendorong publik dan Pemerintah sebagai bagian masyarakat internasional untuk ambil bagian secara aktif merespon isu tersebut.

MPBI berhasil membawa gaung itu ke tataran nasional dan bahkan lokal. Penyebarluasan gagasan dan kerangka kerja global seperti Kerangka Aksi Hyogo atau *Hyogo Framework of Action* (HFA) dan "Living with Risk" ke Indonesia membawa informasi yang segar tentang perlunya Indonesia menceburkan diri dalam bidang PB di kancah global.

Terkait dengan pelaksanaan HFA di Indonesia, di tingkat nasional MPBI terlibat secara aktif dalam mendorong lahirnya Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) maupun Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB). Penyusunan RAD PRB di sejumlah wilayah seperti Jogjakarta, atau Banten kemudian menginspirasi daerah-daerah lain untuk menyusun rencana aksi serupa. Dokumen tersebut diharapkan menjadi rujukan bagi para penyelenggara pembangunan di Indonesia dimana aspek pengurangan risiko harus terintegrasi ke dalam keseluruhan program pembangunan.

MPBI juga menjadi lembaga yang sedari awal memperkenalkan standar-standar SPHERE yang kemudian dilatihkan di Indonesia. Pelatihan-pelatihan SPHERE yang difasilitasi MPBI antara lain di Aceh, Bali, Bogor, Makasar, Surabaya, dan Jogjakarta. Bagian dari upaya pengenalan standar SPHERE ini MPBI menerbitkan buku SPHERE berikut handout untuk membantu memudahkan memahami dan menerapkan standar-standar Sphere dalam kerja-kerja PB.

[11] MPBI memosisikan diri dan melakonkan peran dengan legitimasi yang setara dengan peran pemerintah dan para pelaku internasional termasuk para donor. Dalam kapasitas itu MPBI melakukan dialog-dialog tingkat tinggi dengan para pejabat negara, badan internasional dan para donor dalam hal konsep dan kebijakan. Pihak-pihak itu memandang MPBI sebagai suatu jendela untuk menilik nilai, pola pikir, dan pandangan serta arahan dari masyarakat adat sebagai *mitra kritis* di bidang PB.

[12] Dalam lima tahun, MPBI juga berhasil menguatkan jati dirinya sebagai suatu organisasi yang lengkap. Garis besar haluan organisasi dan program jangka menengah sudah dirumuskan dengan jelas dan konsisten dengan tujuan yang digariskan oleh Anggaran Dasarnya. Sekarang MPBI sudah mempunyai kantor yang tetap, kepengurusan yang stabil, status keuangan yang memadai, dan sistem serta jaringan kerja yang lumayan luas. Hubungan kerja dengan pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah juga kuat dan meluas. Pada sisi yang lain, setelah lima tahun lahir, MPBI belum dapat melakukan regenerasi secara sistematis. Ia semakin tergantung para pendiri dan "generasi tua" yang pada hakekatnya semakin tinggi menapak jenjang profesi dan semakin jauh meninggalkan orbit keorganisasian sehingga tidak dapat menjadi pamong yang sempurna bagi pengurus dan staf MPBI yang bekerja keras membangun "Kantor Sekretariat" MPBI.

[13] MPBI membantu mendorong agenda PB ke dunia pendidikan. MPBI memandang bahwa anak-anak merupakan kelompok rentan terhadap kejadian bencana dan karenanya perlu

mendapatkan pengetahuan dan informasi sejak dini tentang berbagai jenis ancaman, risiko dan hal-hal lain terkait bencana. Untuk mengefektifkan gerakan pengenalan materi bencana ke dunia pendidikan ini, tahun 2006 MPBI ikut membidani lahirnya Konsorsium Pendidikan Bencana (KPB) yang anggotanya lembaga multisektor dan tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah anggota KPB saat ini adalah 38 lembaga. Bersama dengan lembaga-lembaga lain, MPBI menjadikan KPB sebagai wahana untuk ‘mengintervensikan’ berbagai pengetahuan tentang kebencanaan yang muaranya untuk membentuk komunitas sekolah siaga bencana.

MPBI juga ikut memulai gerakan untuk mendorong diperkenalkannya PB berbasis masyarakat atau *community based disaster risk management* (CBDRM) yang juga mendapat momentum cukup tinggi. Simposium nasional tentang pendekatan CBDRM telah secara tahunan dilaksanakan sampai tahun ke empat ini dan akan tetap berpotensi untuk berlangsung ke tahun-tahun berikutnya.

REFLEKSI TERHADAP MPBI

[14] MPBI didirikan dengan tumpuan gagasan yang sederhana tetapi visioner, yaitu sebagai suatu wadah berhimpun bagi para pelaku untuk praktik PB yang lebih baik demi terwujudnya masyarakat yang diliputi rasa aman dari risiko bencana. Hanya ada tiga premis utama, yaitu konsep wadah berhimpun, praktik yang lebih baik, dan kontribusi terwujudnya rasa aman masyarakat dari risiko bencana. MPBI didirikan bukan sebagai organisasi pelaksana. Ia berminat menjadi arena wacana arus atas pada tataran konsep dan kebijakan dan konvergensinya dengan praktik di lapangan. Premis ini membadani cita-cita awal MPBI, yaitu:

1. [15] Menjadi suatu masyarakat: (*a society is an extended social grouping of individuals which is united by mutual consent, characterised by common interests and may have distinctive culture and institutions in order to deliberate, determine and act jointly for some common purpose*). Sebagai tempat persinggahan mereka yang kehausan, mata air ini perlu mempunyai keistimewaan yang memungkinkannya untuk terus memancar. Semakin banyak orang mengambil airnya semakin banyak pula debit airnya karena para pengambil airnya juga mengisi dan mengayomi mata air tersebut. MPBI divisikan sebagai suatu organisasi berbasis anggota dan keanggotaan di antara para pengambil kebijakan, praktisi dan akademisi, dan sebagainya yang memanfaatkan sekaligus mengisi dan mengayomi seperti itu.
2. [16] Praktik PB yang lebih baik: mendorong profesionalisasi praktik PB, yaitu suatu praktik yang selaras antara konsep - kebijakan dan pelaksanaannya; yang didasari oleh falsafah dan ilmu pengetahuan dan dikendalikan oleh nilai-nilai etika.
3. [17] Ke arah rasa aman dari risiko bencana: pada akhirnya semua itu diarahkan pada pencapaian suatu rasa aman sebagai bagian dari hak asasi dalam konteks suatu masyarakat yang sejahtera dan bermartabat.

Sebagai kelompok yang beraspirasi untuk menjadi motor penggerak isu, wacana dan implementasi PB baik secara keilmuan dan praktik, MPBI memposisikan dirinya sebagai

organisasi utama yang mendorong kepemimpinan isu PB. MPBI mengupas isu PB dari hulu hingga hilir melalui eksplorasi dengan berbagai macam latihan, diskusi, refleksi dan implementasi program baik langsung maupun tidak langsung. Dari sana cukup banyak organisasi yang kemudian melakukan replikasi atas kerja-kerja MPBI dan membawanya ke tataran praktik di lapangan.

KAJIAN POSISI MPBI

[18] Di mana posisi MPBI hari ini dalam kerangka besar organisasi ini? Beberapa bacaan sekarang adalah sebagai berikut:

[19] Pertama, MPBI tidak lagi dikenal sebagai suatu organisasi yang berbasis keanggotaan, juga bukan sebagai suatu jejaring organisasi pelaku PB. Tidak ada ketentuan dan arahan organisasi yang jelas tentang keanggotaan. Para anggota merasa tidak mendapatkan manfaat yang jelas dari keanggotaannya di MPBI. Tidak ada anggota yang menikmati pembagian dan akses informasi berkala yang terorganisasi, tidak ada sumbangan dan pengakuan profesional, apalagi manfaat langsung dari proyek-proyek MPBI. Maka kecuali sekelompok kecil yang masih memelihara harapan, sebagian besar anggota berhenti datang ke MPBI untuk mengisi mata air ilmu pengetahuan itu. Pada sisi yang lain orang-orang yang muncul atas nama MPBI baik dalam pelaksanaan proyek, advokasi dan pelatihan hanyalah beberapa orang presidium, pengurus dan staf. Keterbatasan ini juga membawa kemarau perspektif dan penurunan kualitas wacana. Tanpa basis keanggotaan yang meluas dan jejaring afiliasi, MPBI hanya mempunyai khasanah yang miskin, konstituensi dan klien yang tidak jelas dan oleh karenanya tidak mempunyai legitimasi dalam wacana publik.

[20] Kedua, MPBI terbelit semakin ketat dalam dan oleh proyek-proyek arus bawah yang bersifat implementasi sehingga terposisikan sebagai "pelaksana kontrak" ketimbang sebagai mitra setara oleh lembaga-lembaga internasional dan donor. Harus diakui bahwa MPBI mencapai kemapanannya sekarang ini adalah juga atas dasar proyek-proyek seperti itu. Namun kelemahan kendali konseptual dari para pengarahnya cenderung menyeret organisasi ini menjadi "orang suruhan" yang tidak lagi berpikir menjadi tuan atas pemikirannya sendiri dan pemikiran orang lain. Di mata organisasi dan lembaga-lembaga sejawat PB di Indonesia, MPBI adalah semata-mata salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mencari nafkah dari dan menjadi pesaing untuk pekerjaan-pekerjaan PB dari donor internasional. Namun kami ingin menegaskan bahwa tak seharusnya MPBI menjadi 'pengrajin proyek' sehingga tak lagi bisa mengontrol mana yang strategis dan mana yang sifatnya hanya 'pelaksana'. Proyek-proyek yang sifatnya strategis masih penting agar tujuan bisa dicapai, proyek adalah sarana dan bukan tujuan.

[21] Ketiga, MPBI tidak dapat secara optimum memobilisasi hubungan dengan jaringan regional maupun global dalam bidang PB untuk menyuarakan aspirasi masyarakat adat Indonesia. Ia hanya menjadi jejaring yang tidak mampu memainkan peran sebagai pemimpin dalam isu PB. MPBI lebih sering dilihat sebagai penghubung (contact person) dan menjadi bagian dari clearing house PB, di mana pihak luar akan mendapatkan gambaran PB di Indonesia namun tidak mampu mendapatkan hal yang lebih substantif dari nilai kegiatan MPBI.

[22] Keempat, kredibilitas MPBI sebagai suluh praktik PB cenderung meredup. Meskipun jejaring yang dimiliki cukup luas namun ia miskin kemampuan. Orang-orang yang datang untuk mencari atau berbagi ilmu tentang PB merasa tidak terpuaskan karena seringkali hanya mendapati MPBI sebagai suatu organisasi segelintir orang yang tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dan tantangan besar tentang PB serta mereka ini justru sibuk melaksanakan proyek dan bukan dengan pengembangan ilmu PB. Tidak ada lagi produk pelayanan publik yang diterbitkan oleh MPBI sebagai persembahan terhadap suatu praktik PB yang lebih baik.

[23] Kelima, MPBI belum mampu membangun ideologi gerakan dan korsa organisasi yang kuat. Kalaupun ada, masih ada di pikiran dan hati para pendiri dan lingkup "elit" organisasi. Belum diorganisasikan dengan baik sehingga mudah disebarkan dan diturunkan secara sistematis kepada orang lain.

Sebagai organisasi yang lebih dipercaya publik dan organisasi pengambilan keputusan politik, pengelolaan organisasi MPBI yang baik seharusnya dibarengi dengan logika management/tata kelola pengambilan keputusan internal yang kuat, terstruktur, fleksibel dan bertanggung jawab dan tentu saja mengarah pada perbaikan programatik-substantif

MENAPAK ARAH TAHUN 2009 DAN SETERUSNYA

[24] Sampai dengan musyawarah anggota berikutnya, pada bulan Maret 2009, MPBI harus mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan proyek-proyek yang ada dan untuk sementara tidak mencari proyek -proyek baru sehingga dengan demikian dapat memusatkan tenaga dan pemikiran kepada beberapa bidang kerja termasuk urusan-urusan berikut ini:

1. [25] Membuka kembali basis keanggotaan dan organisasi afiliasi MPBI:
 - a. Merekrut anggota secara proaktif atau membuat kategori calon anggota terutama dari para anggota jaringan atau yang pernah menjadi anggota jaringan MPBI. Dengan demikian konstituen organisasi menjadi cukup luas untuk menjadi basis musyawarah anggota yang substantif pada bulan Maret 2009
 - b. Melaksanakan regenerasi pada semua tataran. Musyawarah anggota 2009 akan memilih presidium yang baru dan dengan demikian mendapatkan pemikiran dan kepemimpinan yang segar. Pada saatnya kepengurusan juga akan disegarkan.
 - c. Mengelola anggota-anggota MPBI dimulai yang sudah ada, memberikan nomor induk keanggotaan (berdasarkan tahun masuk, status keanggotaan) dan mulai melaksanakan paket-paket manfaat untuk anggota
 - d. Mengeluarkan suatu garis kebijakan dan menerapkan strategi terbuka mengenai status dan manfaat bagi organisasi afiliasi di kawasan-kawasan dan sektor-sektor kunci di Indonesia.
2. [26] Membawa MPBI kembali ke ranah publik:
 - a. Membuka garis besar haluan organisasi dan program lima tahun MPBI kepada para pemangku kepentingan melalui acara-acara konsultatif secara berkala. Konsultasi resmi dengan badan-badan pemerintah, masyarakat internasional dan donor harus

- dilakukan untuk menentukan reposisi MPBI kembali ke arah yang dimandatkan oleh anggaran dasar.
- b. Mengembangkan jejaring strategis fungsional dengan para pemangku kepentingan. Saat ini banyak pihak yang bekerja untuk isu PB mulai dari instansi-instansi pemerintah (lembaga sektoral), badan-badan dunia/internasional, NGO dan INGO, Ormas dan bahkan Orsospol dan masyarakat pebisnis. kedua kelompok terakhir ini adalah pemain latent dalam isu PB. MPBI secara kritis harus bisa membaca pangsa mana yang menjadi pasar bagi konsentrasi kerja MPBI dan pihak-pihak mana harus direkrut menjadi jejaring yang kuat dan mitra strategis. Hal ini menjadi penting karena arus gelombang isu PB sedang menjadi kecenderungan dan masing-masing pemangku kepentingan memiliki visi misi termasuk tujuan akhir capaian yang berbeda.
 - c. Melakukan investasi dalam bidang komunikasi massa melalui internet.
3. **[27]** Menjadikan MPBI kembali sebagai pelaku utama wacana publik PB:
 - a. Menceburkan diri secara aktif dalam pembentukan dan pelaksanaan Platform Nasional dengan berinvestasi untuk sektor masyarakat adat.
 - b. Menjadi katalis dan mitra kritis Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
 - c. Mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan.
 - d. Mendorong perumusan kerangka etika praktik PB dan dalam kaitan itu bersama dengan kerangka hukum membentuk adanya tanggung gugat, partisipasi, transparansi dan akuntabiliti dalam pelaksanaan PB.
 4. **[28]** Membentuk dan membangun simpul-simpul sumberdaya dan pendorong aktivitas anggota di daerah. Dimulai dan mengoptimalkan simpul-simpul sumberdaya yang sudah ada. Dengan menggerakkan jaringan organisasi afiliasi dan jejaring kerjasama dengan departemen terkait, lembaga-lembaga masyarakat adat dan juga pemerintah, MPBI akan menjadi motor dari penguatan kapasitas PB di daerah dan dengan / untuk pemerintah daerah.
 5. **[29]** Membentuk dan membangun "rumah belajar" yang dapat digunakan oleh anggota untuk meningkatkan kemampuannya dalam bidang PB. Rentang kegiatan yang akan diwadahi di/oleh MPBI harus mulai dari diskursus yang bersifat teoritis sampai dengan tataran pragmatis; sekaligus menyediakan diri sebagai ruang berkegiatan dan berkarya nyata.
 6. **[30]** Mengupayakan peletakan batasan-batasan konseptual tentang PB dan bagaimana konsep-konsep kunci itu dibedakan satu dari yang lainnya, antara lain PB, pengurangan risiko bencana, pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, dan dampak perubahan iklim di Indonesia, konsep penanganan darurat kemanusiaan, pengungsi, rekonstruksi dan pemulihan pasca bencana. MPBI akan mengembangkan strategi komunikasi massa kepakaran PB secara berkala untuk merangsang diskursus khusus seperti ini.

PERMINTAAN DUKUNGAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN

[31] Menyadari sepenuhnya bahwa agenda besar PB masih dan akan tetap relevan untuk Indonesia, sementara pelurusan arah organisasi adalah suatu pekerjaan yang tidak mungkin dapat dilaksanakan hanya oleh beberapa orang saja diantara para pengurus, maka MPBI mengajak para pemangku kepentingan untuk memperlakukan risalah resolusi ini juga sebagai permintaan bantuan dan dukungan.

[32] Dari anggota:

1. Memberikan MPBI kesempatan lagi untuk memperbaiki diri, mendaftarkan diri lagi sebagai anggota aktif.
2. Menyumbang secara proaktif, memberikan respons, dukungan kepada, dan tuntutan pelayanan dari para pengurus dan staff MPBI.
3. Menjadi relawan sebagai jejaring dan duta hubungan dan karya MPBI di sektor dan daerah.

[33] Dari organisasi-organisasi sejawat warga masyarakat adab:

1. Memperlakukan MPBI sebagai mitra - dan bukan pesaing - dari penyelenggaraan kegiatan-kegiatan PB terutama yang bersifat "arus atas" seperti konsep, kebijakan, dan jejaring antar jaringan kerja PB.
2. Menjadi organisasi afiliasi MPBI untuk bersama-sama menjadi mitra dan jejaring advokasi dan kegiatan PB.
3. Menggunakan MPBI sebagai arena diskursus dan bursa kegiatan PB di antara dan sesama warga masyarakat adab di bidang PB.

[34] Dari pemerintah:

1. Menggunakan pelayanan-pelayanan dengan dan di antara jejaring MPBI sebagai faktor penguat penerapan UUPB dan praktik PB pada umumnya di sektor maupun di daerah.
2. Memposisikan MPBI sebagai warga masyarakat adab yang mempunyai jejaring untuk menguatkan kapasitas unsur-unsur pengarah di Badan-Badan PB, khususnya dari konstituen masyarakat adab dan organisasi profesional.
3. Memasukkan MPBI sebagai kaki tungku ketiga dari upaya sertifikasi profesi PB mewakili masyarakat pengguna Pelayanan PB.

[35] Dari organisasi internasional dan pendonor:

1. Memandang pengembangan kapasitas PB sebagai agenda yang absah di Indonesia, dan dalam kaitan itu memperlakukan MPBI sebagai salah satu mitra-mitra strategis - bukan sekedar pengrajin atau sub-kontraktor - untuk mengonseptualisasi, mengembangkan, dan menyampaikannya.
2. Memperlakukan dan mengadvokasikan pembangunan kelembagaan, penguatan kapasitas, dan penyediaan sumberdaya berkesinambungan bagi MPBI sebagai salah satu penanaman modal strategis di bidang PB di Indonesia.

3. Mendorong dan memfasilitasi MPBI sebagai salah satu wadah representasi masyarakat adat untuk diskursus PB di region Asia/Asia Tenggara dan global.

[36] Dari pengurus dan staff:

1. Memandang anggota dan organisasi afiliasi sebagai konstituen utama yang layak menerima pelayanan terbaik dari MPBI.
2. Memosisikan diri sebagai fasilitasi perkembangan para anggota dan organisasi afiliasi dan dalam kaitan itu meletakkan diri sebagai pihak yang bertanggung jawab dan/atau bertanggung gugat.
3. Meningkatkan kualitas profesionalisme sebagai perwujudan penghargaan terhadap kepercayaan dan kesempatan ulang yang diberikan oleh par anggota, organisasi afiliasi dan para pemangku kepentingan lainnya.

[37] MPBI menyatakan terimakasih setinggi-tingginya kepada para pemangku kepentingan atas kepercayaannya dan pemberian kepercayaan lagi kepada MPBI untuk tahun 2009 dan seterusnya. Sekali lagi MPBI mengajak para pemangku kepentingan untuk menggunakan risalah Perspektif Awal tahun 2009 ini sebagai sarana berinteraksi dengan MPBI. Sampaikan pendapat, saran dan dorongan melalui berbagai cara, agar MPBI dapat menjalankan peranannya dengan optimal. Mari bersama kita kita perbaiki dan wujudkan sistem PB yang andal di Indonesia demi keselamatan dan kesejahteraan Masyarakat Indonesia dimasa depan

Selamat Tahun Baru 2009

Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI)

Jl. Kebon Sirih No. 5G Kebon Sirih

Jakarta Pusat 10340

Telp/Fax: +62-21-3103535, +62-21-3147321.

Hotline: +62-21-93220102

Website: <http://mpbi.org>

Email: diskusipb@mpbi.org